

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi.

Prediksi bahwa Bank Syariah akan terus meningkat bahkan menggantikan Bank Konvensional, masih perlu waktu dan bukti nyata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, meski potensi pasar Perbankan Syariah sangat besar, saat ini pangsa pasarnya baru mencapai 5,1 persen dari total keseluruhan industri perbankan di Indonesia. Meski demikian, bukan berarti Bank Syariah di Indonesia tidak menunjukkan pertumbuhan menggembirakan. Saat ini Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Perkembangan ini disertai juga dengan munculnya instrument-instrumen keuangan berbasis syariah lain dan terus naiknya jumlah Bank Syariah di Indonesia.

Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 juga telah lahir bank syariah pertama sebagai pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum.

Sistem perbankan syariah yang juga diatur dalam Undang – undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Rivai, 2006 : 2).

Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah juga memulai periode baru dalam industri Keuangan Syariah di Indonesia. Meningkatnya jumlah Bank Syariah di Indonesia adalah salah satu tanda pertumbuhan Perbankan Syariah Indonesia. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa jumlah Bank Umum Syariah terus bertambah pasca pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun
2006 – 2016

Tahun	Jumlah Bank Umum Syariah	Nama Bank Umum Syariah
2006 – 2007	3	1. Bank Muamalat Indonesia, 2. Bank Syariah Mandiri, 3. Bank Mega Syariah
2008 – 2009	5	1. Bank Muamalat Indonesia, 2. Bank Syariah Mandiri, 3. Bank Mega Syariah, 4. Bank BRI Syariah, 5. Bank Syariah Bukopin
2010 – 2013	11	1. Bank Muamalat Indonesia, 2. Bank Victoria Syariah, 3. Bank BRI Syariah, 4. Bank Jabar Banten Syariah, 5. Bank BNI Syariah, 6. Bank Syariah Mandiri, 7. Bank Mega Syariah, 8. Bank Panin Syariah, 9. Bank Syariah Bukopin, 10. BCA Syariah, 11. Maybank Syariah Indonesia

2014 – 2015	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Muamalat Indonesia, 2. Bank Victoria Syariah, 3. Bank BRI Syariah, 4. Bank Jabar Banten Syariah, 5. Bank BNI Syariah, 6. Bank Syariah Mandiri, 7. Bank Mega Syariah, 8. Bank Panin Syariah, 9. Bank Syariah Bukopin, 10. BCA Syariah, 11. Maybank Syariah Indonesia, 12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
2016	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Muamalat Indonesia 2. Bank Victoria Syariah, 3. Bank BRI Syariah, 4. Bank Jabar Banten Syariah, 5. Bank BNI Syariah, 6. Bank Syariah Mandiri, 7. Bank Mega Syariah, 8. Bank Panin Syariah, 9. Bank Syariah Bukopin, 10. BCA Syariah,

		11. Maybank Syariah Indonesia, 12. PT. Bank Aceh Syariah 13. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
--	--	--

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah, Desember 2010-2016*

Dalam perbankan umum maupun perbankan syariah dikenal dengan nama dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama adalah dana yang berasal dari pihak bank bisa itu berupa pemilik bank, pemegang saham (ikut dalam mendirikan bank) maupun pemegang saham selanjutnya dan pemegang saham publik, yang tergolong pada kelompok dana pihak pertama adalah sebagai berikut : modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan, laba ditahan (*Retained Earning*). Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank, yang tergolong pada kelompok dana pihak kedua adalah sebagai berikut : Pinjaman Bank Indonesia, interbank call money, *Repurchase Agreement*, Fasilitas Diskonto, Pinjaman Subordinasi, Pinjaman dari bank (antarbanc), Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Obligasi (*bonds*) dan saham. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dan merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank, yang tergolong pada dana pihak ketiga adalah sebagai berikut : Tabungan (*Saving Deposit*), Giro (*Deman Deposit*), Deposito (*Time Deposit*).

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah sendiri merupakan *pool* dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana

Bank Syariah, yaitu Simpanan Wadiah (*IB Wadia*), Dana Investasi Non Profit Sharing (*Non Profit Sharing Investment Fund*), dan Dana Investasi Profit Sharing (*Profit Sharing Investment Fund*). Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah dihimpun oleh bank akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, untuk menghasilkan pendapatan. Selain itu, pengalokasian Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan, tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas bank tetap aman. Perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat. Sedangkan kemampuan Perbankan Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dan bersaing dengan Perbankan Konvensional di tengah perubahan-perubahan kondisi ekonomi makro Indonesia akan ikut menentukan besar-kecilnya peran Perbankan Syariah nasional dalam perekonomian negeri ini dan andilnya dalam Industri Keuangan Syariah Dunia yang kian membesar.

Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat (Winda, 2009 : 10).

Menilik data statistik perbankan syariah, jumlah nasabah dana pihak ketiga (DPK) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah naik menjadi 19.87 juta pada bulan Juni 2017 dibandingkan akhir 2016 yang sebanyak 18.52 juta. Sementara ini Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bulan Juni tahun

2017 adalah sebesar 302.013 Miliar meliputi Dana Simpanan Wadiah (*IB Wadia*) 42.414 Miliar, Dana Investasi Non Profit Sharing (*Non Profit Sharing Investment Fund*) 259.599 Miliar dan Dana Investasi Profit Sharing (*Profit Sharing Investment Fund*) adalah - Miliar. (Statistik Perbankan Syariah, Juni 2017).

Dana simpanan wadiah bertambah dari Rp 38.361 Miliar menjadi Rp 42.414 miliar. Dari total tersebut, simpanan giro rupiah mengalami ketidakstabilan. Pada bulan Desember 2016 Rp 17.22 triliun naik menjadi sekitar Rp 22.08 triliun pada bulan April 2017, tetapi mengalami penurunan pada bulan Juni 2017 menjadi Rp. 17.22 triliun. Giro valas mengalami kenaikan dari Rp 2.93 triliun menjadi Rp 5.10 triliun. Sedangkan simpanan tabungan rupiah naik dari Rp 18.03 triliun menjadi Rp 19.9 triliun. Tabungan valas stabil dari Rp 170 miliar menjadi Rp 170 miliar.

Dibandingkan dengan bulan-bulan dan tahun-tahun sebelumnya, bulan Juni 2017 mempunyai nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) tertinggi yang artinya nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Beberapa elemen kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Perbankan Syariah adalah Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga deposito bank konvensional, inflasi IHK dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Bank Indonesia, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013a).

Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dibuktikan dengan data yang didapat dari Badan Statistik Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Sukirno (2006: 200-201),

mengungkapkan alasan mengapa tingkat tabungan bertambah tinggi dalam pembangunan, yaitu bahwa sumber dari berlakunya kenaikan tabungan dan penanaman modal adalah tingkat keuntungan atau surplus yang bertambah besar yang dinyatakan dengan persentase dari pendapatan nasional yang semakin meningkat. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pendapatan nasional dari Sembilan sektor. Perubahan pendapatan sektor-sektor tersebut mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan maupun korporasi, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi besaran investasi dan tabungan masyarakat.

Menurut penelitian Achmad Tohari (2010) Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Artinya, apabila terjadi kenaikan inflasi, maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rossar Maries (2008 : 65) yang menyatakan dampak yang ditimbulkan dari inflasi adalah berkurangnya pendapatan riil masyarakat diakibatkan turunnya nilai riil uang. Turunnya nilai riil uang maka pendapatan riil yang diperoleh menjadi berkurang. Berkurangnya pendapatan mengakibatkan kemampuan nasabah untuk menabung atau menyimpan uang dibank menjadi turun karena pendapatan yang diperoleh habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Di Indonesia sendiri mengenal sistem perbankan yang menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam pelaksanaan sistem dual banking di mana Perbankan Syariah masih memiliki pangsa yang kecil, maka dalam kegiatan usahanya Bank Syariah seringkali masih dipengaruhi oleh Bank Umum. Salah satu faktor

pengaruh tersebut ialah faktor tingkat suku bunga deposito pada bank umum. Berdasarkan efek substitusi, kenaikan suku bunga deposito bank umum dapat mengakibatkan perpindahan dana dari perbankan syariah ke Bank Umum. Hal ini dikarenakan nasabah yang *profit oriented* akan memilih mendepositokan dananya pada produk yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Sebagaimana diperlihatkan oleh penelitian Rahayu dan Pranowo (2012), yaitu bahwa suku bunga deposito secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Deposito *Mudharabah*.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abida Muttaqiena (2013), menyatakan bahwa nilai Tukar RP/\$ memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil penelitiannya, Kurs Tengah Dollar AS Terhadap Rupiah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap DPK Perbankan Syariah dengan arah koefisien negatif. Ini berarti bahwa Perbankan Syariah rentan terhadap perubahan nilai tukar Rupiah. Jika nilai Rupiah melemah, DPK Perbankan Syariah juga akan menurun. Ini sesuai dengan teori, dimana baik nasabah individu maupun nasabah korporasi akan cenderung menarik dana-dananya dari Perbankan Syariah jika nilai Rupiah melemah. Nasabah korporasi akan cenderung menarik dana likuid dengan return rendah untuk mengatasi masalah permodalan yang timbul akibat meningkatnya biaya produksi karena kenaikan harga bahan mentah dan barang modal yang berasal dari impor. Sedangkan sesuai dengan nature-nya, produk-produk simpanan di Perbankan Syariah memiliki return yang relatif kurang pasti dibandingkan dengan

Bank Konvensional, sehingga pelemahan Rupiah akan berdampak signifikan negatif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diteliti bagaimana pengaruh variabel – variabel makroekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Tahun 2012 – Juni 2017 agar diketahui kemampuan pertumbuhan Perbankan Syariah di tengah perubahan – perubahan makroekonomi di Indonesia saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012 – Juni 2017 ?
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012 – Juni 2017 ?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada keterkaitan antara variabel – variabel seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Maka dari itu penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh Variabel independen Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan 2010, inflasi IHK, tingkat suku bunga 1 bulan deposito bank konvensional dan nilai tukar rupiah terhadap dollar US terhadap variabel dependen Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia.
2. Penelitian ini focus pada Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012 – Juni 2017.
3. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data *time series* Triwulan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia selama periode tahun 2012 – Juni 2017.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah secara parsial terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012 – Juni 2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Rupiah secara simultan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2012 – Juni 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

a. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi penulis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki mengenai Perbankan Syariah Indonesia.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh lingkungan makro terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

b. Bagi Otoritas Moneter

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada pemegang kebijakan moneter di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

1.6. Kerangka Penulisan

Setelah seluruh informasi dan data – data yang mendukung penelitian ini diperoleh, maka penulisan skripsi dapat disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab II ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode sampling, variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini berisi tentang profil perusahaan beberapa bank unit syariah yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil penelitian yang dilakukan serta dilanjutkan dengan pembahasannya.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran – saran. Serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.